



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 15077-15089

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Wacana Kritis Pada Artikel Tempo.co yang Berjudul "Dana BOS untuk Program Makan Siang Gratis"

Sajdan Salman Fasha^{1✉}, Dema Tesniyadi²

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: sajdans19@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini menganalisis wacana penggunaan Dana BOS untuk program makan siang gratis yang diusulkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis (CDA) dari Norman Fairclough. Teknik analisis dilakukan dalam tiga dimensi, yang mencakup analisis teks, produksi, dan sosial. Hasil penelitian mengungkap bagaimana wacana media mencerminkan interaksi sosial dan politik serta usaha memengaruhi kebijakan pendidikan melalui bahasa.

Kata Kunci: *Wacana, Dana BOS, Makan Siang Gratis*

Abstract

This research analyzes the discourse on the use of the BOS Fund for the free lunch program proposed by the Coordinating Minister for the Economy Airlangga Hartarto, this research was conducted using Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis (CDA) approach. In this research, the analysis is conducted in three dimensions that include text, production, and social analysis. The results reveal how media discourse reflects social and political interactions and attempts to influence education policy through language.

Keywords: *Discourse, BOS Fund, Free Lunch Program*

PENDAHULUAN

Kontestasi pemilihan presiden 2024 melahirkan banyak wacana yang dihadirkan kepada publik, salah satu wacana yang ramai dibicarakan oleh masyarakat pada periode kontestasi pemilihan presiden 2024 yaitu wacana makan siang gratis. Wacana makan siang gratis merupakan salah satu program kerja yang ditawarkan oleh pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam kampanye pemilihan presiden 2024, program ini rencananya akan dibagikan kepada 82,9 juta orang miskin, yang terbagi dalam 3 golongan; 74,2 juta anak sekolah, 4,3 juta santri, dan 4,4 juta ibu hamil (Prabowogibran2.id). Program ini digagas sebagai upaya peningkatan kesejahteraan anak-anak dan masyarakat luas, harapannya program ini juga dapat meningkatkan kualitas SDM di Indonesia menuju generasi emas 2045 dan menjadi dorongan bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional.

Anggaran yang akan digunakan untuk merealisasikan program makan siang gratis ini sebesar 450 triliun dan rencananya program ini akan dimulai pada tahun 2025 mendatang. Setelah pasangan Prabowo-Gibran unggul dalam hasil quickcount pemilihan presiden 2024 di berbagai lembaga survei, muncul wacana bahwa pendanaan makan siang gratis akan dilakukan melalui dana BOS. Wacana ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga menjabat sebagai ketua umum partai Golkar (partai pengusung pasangan Prabowo-Gibran), yaitu Airlangga Hartarto saat simulasi makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten pada 29 februari 2024. Dalam wawancaranya dengan media, Airlangga mengatakan bahwa sistem penganggaran melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) relatif sudah mapan. Karena itu, pola penganggaran tersebut memungkinkan untuk membiayai makan siang gratis yang menargetkan siswa sekolah.

Wacana penggunaan dana BOS untuk penganggaran program makan siang gratis menjadi polemik di masyarakat dan mendapat respon dari Federasi Serikat Guru Indonesia

(FSGI) dan Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) yang menolak wacana penggunaan dana BOS untuk membiayai program makan siang gratis. Kedua organisasi tersebut menolak dengan alasan tidak semua sekolah mendapatkan BOS Afirmasi dan besaran anggaran BOS Afirmasi yang didapatkan tiap sekolah rata-rata hanya Rp 100 juta per tahun. Dana tersebut tidak akan cukup untuk mendanai makan siang gratis, karena selama ini sebagian besar dana BOS dialokasikan untuk membayar gaji guru dan tenaga pendidik honorer. Walaupun penganggaran makan siang gratis menggunakan dana BOS masih dalam tahap wacana, tetapi wacana bukan hanya sekedar informasi/rencana tetapi juga sudah menjadi praksis sosial dalam interaksi simbolis (Fairclough, 2010). Karena dalam proses sosial, bahasa menjadi alat komunikasi yang digunakan dalam interaksi sosial, dan menjadi sarana produksi dan reproduksi wacana. Bourdieu mengatakan bahwa bahasa bukan hanya sekedar alat untuk berkomunikasi, tetapi juga bagian dari alat kekuasaan (Bourdieu, 1982).

Dalam konteks wacana mengenai kebijakan makan siang gratis, kebijakan erat kaitannya dengan kekuasaan, yang memiliki pengaruh dalam beberapa cara: pertama, ketakutan, di mana seseorang yang merasa takut akan patuh dan tunduk kepada orang yang ditakutinya. Kedua, kepercayaan, yang muncul dari interaksi antara individu. Ketiga, pemujaan, di mana seseorang yang memiliki kekuasaan akan dicintai oleh orang lain. Berdasarkan ketiga faktor ini, seorang penguasa dapat mengimplementasikan kekuasaannya (Hayat, 2023).

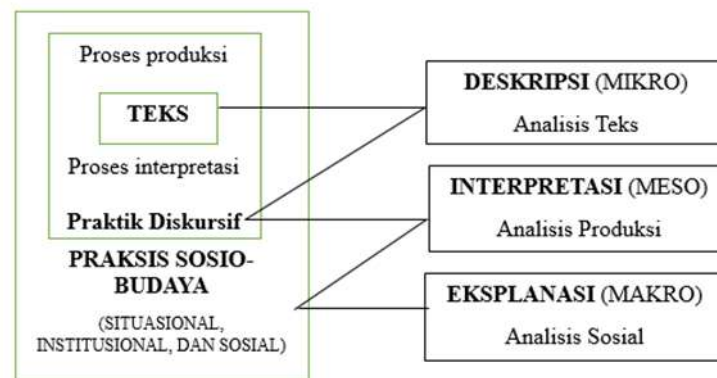
Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk menganalisis fenomena tersebut dengan menggunakan metode Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough. Penelitian akan dilakukan dengan analisis teks, analisis produksi, dan analisis sosial pada pemberitaan tempo.co yang berjudul "Dana BOS Untuk Program Makan Siang Gratis".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Analisis Wacana Kritis (AWK) model Norman Fairclough. AWK tertarik pada cara bagaimana bahasa dan wacana digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial, termasuk kohesi sosial dan perubahan sosial (Haryatmoko, 2022:4). Menurut Haryatmoko (2022:5) asumsi dasar dari AWK yaitu bahwa bahasa mempunyai beragam fungsi dan beragam konsekuensi. Artinya bahasa bisa digunakan untuk memerintah, membujuk, merubah, menjelaskan, mengaburkan informasi dan lain sebagainya. Hal ini sejalan dengan tiga aspek bahasa menurut J.L. Austin (1975:101-102) dalam Haryatmoko (2022:6) yaitu aspek locutionary, illocutionary, dan perlocutionary. Aspek

locutionary berkaitan dengan makna wacana, aspek illocutionary berkaitan dengan implikasi subjek berupa tindakan, dan aspek perlocutionary berkaitan dengan efek (berkaitan dengan ekspresi) dari bahasa yang disampaikan.

Penelitian ini akan dilakukan dengan memperhatikan tiga dimensi AWK yang dipaparkan oleh Fairclough dalam Haryatmoko (2022:23) seperti gambar di bawah ini.



Gambar 1. Tiga Dimensi AWK

Sumber: Haryatmoko (2022)

Pada tahap awal yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu analisis teks, hal mendasar yang perlu dianalisis dari teks adalah penggunaan kata dan metafora yang terkait dengan makna tertentu. Karena satu kata bisa mempunyai banyak makna tergantung pada konteksnya. Dimensi teks mengingatkan peneliti agar tidak sewenang-wenang dalam proses interpretasi, dan hasil interpretasi tersebut tidak terlepas dari makna teks itu sendiri.

Selanjutnya yaitu analisis praktik diskursif, pada tahap ini yang ingin dilihat yaitu sejauh mana kekuatan pernyataan atau kekuatan afirmatifnya dalam mendorong tindakan. Dalam dimensi ini akan dilihat koherensi teks-teks yang sudah masuk ke wilayah interpretasi. Pada tahap ini intertekstualitas teks sudah mendapat perhatian khusus (Fairclough, 1995:75).

Yang terakhir yaitu analisis sosial, pada tahap ini peneliti menganalisis hubungan antara praksis sosio-budaya dan teks yang dijumpai oleh praksis wacana. Yang ingin dilihat dari proses analisis ini yaitu bagaimana praksis wacana ditarik dari tatanan teks dan dihubungkan dengan praksis sosial. Dalam tahap ini juga penulis akan mengaitkan konteks sosial dari wacana tersebut dengan teori strukturasi Anthony Giddens.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Teks

Menurut Norman Fairclough (1995) representasi teks merupakan bagian penting dari analisis wacana kritis. Dalam model Fairclough, analisis teks dilakukan secara linguistik dengan memeriksa kosa kata, semantik, dan struktur kalimat. Ini juga mencakup aspek koherensi dan keterpaduan, yakni bagaimana kata atau kalimat digabungkan untuk menciptakan makna. Fairclough menyatakan bahwa representasi dalam teks berita dapat dianalisis melalui beberapa aspek, yaitu: (1) pemahaman, yang melibatkan asosiasi dan metafora; (2) tata bahasa, termasuk bentuk proses dan partisipan. Bentuk proses mencakup tindakan, peristiwa, keadaan, dan proses mental, sedangkan partisipan mencakup pelaku, korban, dan partisipan nominal; (3) kombinasi klausa atau koherensi lokal, yang meliputi penjabaran, perluasan tambahan, ekstensi kontras, ekstensi seleksi, dan peninggian; serta (4) rangkaian antar kalimat atau penyorotan bagian penting dalam teks berita.

Tabel 1. Data Kutipan Isi Berita

Data	Kutipan isi Berita
1	"Dana Bos Untuk Program Makan Siang Gratis"
2	"Anggaran Program Makan Siang Gratis milik Calon Presiden Prabowo Subianto sudah mulai dibicarakan. Terbaru, Menteri Koordinator Untuk Perekonomian, Airlangga Hartanto, mengusulkan program itu dibayarkan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)"
3	"Terbaru, Menteri Koordinator Untuk Perekonomian, Airlangga Hartanto, mengusulkan program itu dibayarkan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)"
4	"Airlangga menyatakan hal itu saat simulasi di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Kamis 29 Februari 2024. "Kami mengusulkan pola pendanaannya melalui Bantuan Operasional Sekolah spesifik atau BOS Spesifik atau BOS Afirmasi untuk khusus menyediakan makan siang untuk siswa," ujar Airlangga"
5	"Menurut Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Program Makan Siang Gratis akan menghabiskan kira-kira Rp 450 triliun untuk satu tahun. Nilai tersebut setara dengan 14 persen dari total APBN. Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan bantuan makan siang gratis itu akan menyerap Rp 185,2 triliun, yakni 5,6 persen dari total APBN. Kedua hitungan ini masih lebih mahal dari anggaran yang diberikan untuk Dana BOS dan dana serupa lainnya dalam APBN tahun ini."
6	"Penolakan dari para guru", "Sementara itu, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menolak keras penggunaan dana BOS untuk membiayai program makan siang gratis.

Penolakan itu disampaikan oleh Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri."

7 "Tanggapan Kemendikbudristek"

Sumber: tempo.co

Pada data (1), tema besar yang ingin ditampilkan dalam judul yang tertera pada *infografis* pemberitaan yang dirilis oleh tempo berupa pernyataan "*Dana Bos Untuk Program Makan Siang Gratis*". Teks tersebut dicetak dengan huruf besar pada semua kata dan background berwarna abu-abu. Pada bagian kata "*Dana BOS*" dicetak tebal dengan huruf berwarna merah, sedangkan pada bagian kalimat "*Untuk Program Makan Siang Gratis*" dicetak kapital dengan warna huruf hitam. Frasa ini menarik perhatian karena mencakup dua elemen populer, yaitu: "*makan siang*" dan "*gratis*". Penggunaan huruf yang dicetak kapital, tebal, dan berwarna merah ditujukan untuk menarik perhatian pembaca sekaligus untuk menekankan bahwa topik utama dalam berita/tulisan ini adalah "*Dana Bos*" (yang akan digunakan untuk program makan siang gratis).

Pada data (2), bagian subjudul ditampilkan satu paragraf yang berisi penjelasan "*Anggaran Program Makan Siang Gratis milik Calon Presiden Prabowo Subianto sudah mulai dibicarakan. Terbaru, Menteri Koordinator Untuk Perekonomian, Airlangga Hartanto, mengusulkan program itu dibayarkan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*". Teks tersebut dicetak dibawah judul sebagai penjelasan dari tema besar yang ditampilkan pada bagian judul. "*Anggaran Program Makan Siang milik Calon Presiden Prabowo Subianto sudah mulai dibicarakan*" Frasa ini menyiratkan bahwa program makan siang gratis adalah ide asli dari Prabowo Subianto dan dia adalah orang yang peduli dengan kesejahteraan rakyat.

Pada teks tersebut, penulis memberikan informasi bahwa anggaran program makan siang gratis sudah mulai dibicarakan, penjelasan tersebut didukung oleh kalimat pada data (3) "*Terbaru, Menteri Koordinator Untuk Perekonomian, Airlangga Hartanto, mengusulkan program itu dibayarkan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*". Penggunaan kata "*Terbaru*" menunjukkan bahwa penulis ingin menarik perhatian pembaca dengan menyajikan informasi terbaru mengenai anggaran program makan siang gratis. lalu pada frasa "*Menteri Koordinator Untuk Perekonomian, Airlangga Hartanto*" disebutkan nama dan jabatan untuk memberikan kredibilitas dan otoritas pada usulan tersebut.

Pada data (4), berisi bagian inti pemberitaan yang menampilkan foto Airlangga Hartanto dengan pernyataan Airlangga mengenai penggunaan Dana Bos untuk program makan siang gratis. Pada bagian ini, ditampilkan frasa "*Usulan Airlangga*" yang dicetak tebal

menggunakan huruf besar. Pada bagian ini penulis ingin menekankan kepada pembaca bahwa wacana dana BOS untuk makan siang gratis disampaikan langsung oleh Airlangga. Selain itu, isi pernyataan Airlangga Hartanto dicetak tebal untuk kembali menekankan bahwa pernyataan Airlangga Hartanto lah yang menjadi topik utama dalam pemberitaan ini. Dalam pernyataan tersebut, Airlangga menggunakan kata "Kami" yang merepresentasikan pihak pasangan Presiden Prabowo-Gibran yang mengajukan usulan pola pendanaan program makan siang gratis melalui dana BOS. Adapun proses pemberitaan pada kalimat tersebut adalah bentuk tindakan.

Pada bagian selanjutnya, penulis menampilkan definisi dana BOS yang dikutip dari Kemendikbudristek. Pada bagian ini penulis mencoba menjelaskan definisi dana BOS yang ditujukan untuk pembaca yang masih awam mengenai dana BOS.

Pada data (5), penulis menampilkan hitungan anggaran program makan siang *"Menurut Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Program Makan Siang Gratis akan menghabiskan kira-kira Rp 450 triliun untuk satu tahun. Nilai tersebut setara dengan 14 persen dari total APBN. Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan bantuan makan siang gratis itu akan menyerap Rp 185,2 triliun, yakni 5,6 persen dari total APBN. Kedua hitungan ini masih lebih mahal dari anggaran yang diberikan untuk Dana BOS dan dana serupa lainnya dalam APBN tahun ini."* Pada bagian ini penulis memberikan pernyataan (*statement*) mengenai anggaran makan siang gratis yang dinilai lebih mahal dari anggaran yang diberikan untuk dana BOS dan dana serupa lainnya dalam APBN tahun ini. Adapun bentuk proses pemberitaan pada kalimat tersebut adalah bentuk proses mental.

Pada data (6), *"Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menolak keras penggunaan dana BOS untuk membiayai program makan siang gratis"*. Teks ini menampilkan P2G sebagai pihak yang menentang usulan ini dengan keras. Frasa seperti "penolakan keras" dan kutipan dari Iman Zanatul Haeri yang mengatakan bahwa ini sama saja dengan "menggambil jatah makan para gurunya" mbingkai penolakan ini sebagai tindakan defensif yang lebih mementingkan kepentingan guru daripada siswa. *"Penolakan dari para guru"* Frasa ini menunjukkan oposisi yang kuat dan tegas dari pihak tertentu, dalam hal ini P2G. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa program ini memiliki kekurangan. Adapun bentuk proses pemberitaan pada kalimat tersebut adalah bentuk keadaan yang menggambarkan respon masyarakat terhadap wacana penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis.

Pada data (7), "*Tanggapan Kemendikbudristek*" Frasa ini menunjukkan bahwa program makan siang gratis masih dalam tahap pembahasan. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa program ini belum pasti akan dilaksanakan. Pada bagian ini Kemendikbudristek digambarkan sebagai lembaga yang masih dalam tahap mempertimbangkan usulan ini dengan hati-hati.

Secara keseluruhan, isi teks pada pemberitaan tersebut menyeimbangkan antara potensi manfaat dari program makan siang gratis dengan kekhawatiran praktis tentang sumber dana dan dampaknya pada gaji guru. Hal ini menciptakan framing yang kompleks di mana pembaca dapat melihat kedua sisi dari isu tersebut.

Analisis Produksi

Dalam analisis dimensi produksi, interpretasi dilakukan terhadap pemrosesan wacana, termasuk proses penyebaran atau produksi dan penggunaan wacana, profil media, prosedur editorial, serta cara pekerja media menghasilkan teks.

Dalam proses produksi, Pemberitaan "Dana BOS Untuk Program Makan Siang Gratis" ditulis oleh Imam Riyadi dan dirilis oleh tempo.co pada Kamis, 7 Maret 2024 pukul 16:30 WIB. Artikel ini diproduksi oleh Tempo.co yang merupakan portal berita yang khas dengan gaya jurnalismenya yang kritis, media ini lahir pada tahun 1971. Artikel pemberitaan ini membahas wacana pola anggaran makan siang gratis yang akan menggunakan dana BOS. Dalam isi pemberitaannya, penulis mengutip pernyataan yang disampaikan oleh Airlangga pada saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, pada Kamis 29 Februari 2024. Teks ini mungkin ditujukan untuk memberi informasi sekaligus memengaruhi pembaca tentang pro dan kontra usulan dana BOS untuk makan siang gratis.

Pemberitaan ini kemungkinan diproduksi oleh tim yang terdiri dari jurnalis dan desainer grafis. Hal ini menunjukkan bahwa tempo.co memiliki sumber daya yang memadai untuk memproduksi konten berkualitas tinggi. Adapun proses distribusi pemberitaan ini didistribusikan melalui berbagai platform, seperti situs web tempo.co, media sosial, dan aplikasi mobile. Hal ini menunjukkan bahwa tempo.co ingin menjangkau audiens yang luas dan meningkatkan visibilitas pemberitaan ini. Adapun pada proses konsumsi, audiens yang dituju yaitu pendidik, orang tua siswa, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum yang tertarik pada isu pendidikan dan kebijakan sosial.

Analisis Sosial

Analisis sosial pada wacana didasarkan pada asumsi bahwa konteks sosial yang ada di masyarakat memiliki pengaruh pada munculnya wacana dalam pemberitaan di media

massa. dalam penelitian ini, konteks sosial yang mempengaruhi diproduksinya wacana penggunaan dana BOS untuk makan siang gratis yaitu kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada kontestasi pemilihan presiden pada tahun 2024. Dengan terpilihnya pasangan tersebut, masyarakat tentu mulai membicarakan terkait dengan realisasi program-program yang menjadi janji pada masa kampanye. Salah satu program kerja yang banyak dibicarakan adalah program makan siang gratis, karena rencananya program ini akan menghabiskan dana sebesar 450 triliun untuk satu tahun. Tentu ini menjadi pertanyaan yang muncul dibenak sebagian masyarakat, dari mana sumber dananya dan bagaimana pola penganggaran untuk program tersebut.

Airlangga Hartanto, selaku Menteri Koordinator untuk Perekonomian dan Ketua Umum Partai Golkar, mengusulkan agar program makan siang gratis dibiayai melalui dana BOS. Pernyataan ini adalah usaha Airlangga untuk menyampaikan dan memperkenalkan gagasan tersebut kepada publik. Dalam kerangka teori strukturasi Anthony Giddens, langkah ini mencerminkan signifikasi struktur, yang berfungsi sebagai alat komunikasi dalam memperoleh dukungan dan legitimasi dari masyarakat. Struktur signifikasi berfokus pada makna dan interpretasi yang diberikan dalam wacana publik.

Dalam infografis mengenai penggunaan Dana BOS untuk Program Makan Siang Gratis, terdapat beberapa elemen penting yang mencerminkan struktur signifikasi dalam wacana ini: pertama, frasa makan siang gratis yang memiliki kesan populis yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat luas, khususnya para orang tua dan siswa. Kedua, frasa dana BOS menunjukkan sumber dana yang terfokus pada pendidikan. Airlangga Hartanto, sebagai bagian dari tim kampanye Prabowo-Gibran, berperan sebagai agen yang berupaya mengubah struktur (kebijakan terkait dana BOS) dengan memanfaatkan kekuatan politik mereka untuk mengarahkan alokasi dana BOS ke program makan siang gratis. Dengan menganjurkan penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis, Airlangga berusaha mendapatkan legitimasi dari masyarakat dan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat bagi kesejahteraan siswa, yang pada gilirannya akan mendukung kampanye politik mereka.

Kebijakan pendidikan nasional, khususnya Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), merupakan bagian integral dari struktur sosial dalam sistem pendidikan di Indonesia. Dana ini dirancang untuk mendukung pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di tingkat sekolah dasar dan menengah. Dalam konteks ini, penggunaan Dana BOS untuk program makan siang gratis adalah upaya strategis yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk membingkai kebijakan ini guna memengaruhi wacana di sekitarnya. Menteri Koordinator

Perekonomian, Airlangga Hartarto, memanfaatkan posisinya dalam struktur pemerintahan untuk mengusulkan perubahan penggunaan Dana BOS, dengan tujuan agar program makan siang gratis dapat terealisasi. Tindakan Airlangga ini menunjukkan bagaimana individu yang memiliki kekuasaan berusaha mempengaruhi kebijakan dan struktur yang ada melalui bahasa dan wacana. Dengan mengusulkan penggunaan Dana BOS untuk program makan siang gratis, Airlangga tidak hanya berusaha untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa, tetapi juga untuk memperkuat legitimasi pemerintah dalam memprioritaskan kesejahteraan anak-anak di sekolah. Ini adalah contoh nyata dari praktik sosial dalam bingkai struktur dominasi.

Struktur dominasi merujuk pada penguasaan yang mencakup skemata penguasaan atas orang (politik) dan barang (ekonomi). Dalam hal ini, penguasaan politik terlihat dari posisi Airlangga dalam pemerintahan yang memungkinkan dia untuk mempengaruhi kebijakan pendidikan. Penguasaan ekonomi tercermin dari pengalokasian dana publik (Dana BOS) yang secara tradisional digunakan untuk kebutuhan operasional sekolah, kini diusulkan untuk tujuan yang berbeda, yakni penyediaan makan siang gratis. Lebih jauh lagi, praktik ini menggarisbawahi bagaimana kekuasaan politik dan ekonomi berkelindan dalam proses pengambilan kebijakan. Penggunaan Dana BOS untuk program makan siang gratis juga menggambarkan dinamika interaksi antara berbagai aktor dalam sistem pendidikan, termasuk pemerintah, sekolah, guru, dan masyarakat. Guru, misalnya, melalui Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), menyuarakan penolakan mereka terhadap perubahan ini, dengan alasan bahwa Dana BOS seharusnya digunakan untuk membayar gaji dan kebutuhan pendidikan lainnya. Ini menciptakan dialog dan debat publik yang menunjukkan bagaimana kekuasaan tidak hanya dipegang oleh individu atau kelompok tertentu, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai suara dan kepentingan dalam masyarakat.

Anthony Giddens (1984) menekankan bahwa struktur sosial dan agen saling membentuk satu sama lain. Pada hal ini, penggunaan Dana BOS untuk program makan siang gratis menunjukkan bagaimana struktur sosial (kebijakan pendidikan dan ekonomi) berusaha dibentuk oleh agen (pemerintah, kementerian, dan aktor politik). dominasi tidak hanya mengenai kekuasaan secara abstrak, tetapi juga tentang pengaturan hubungan otonomi dan ketergantungan dalam interaksi sosial, yang melibatkan pengendalian sumber daya material. Dalam konteks kebijakan Dana BOS untuk Program Makan Siang Gratis, hal ini terlihat dari cara Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, menggunakan posisinya untuk mengusulkan perubahan penggunaan dana tersebut. Dengan mengendalikan alokasi Dana BOS, Airlangga dan pemerintah menunjukkan bagaimana

struktur dominasi beroperasi melalui kontrol atas sumber daya ekonomi (dana pendidikan) dan politik (kebijakan publik).

Kebijakan makan siang gratis sebagai sebuah kebijakan tentu diharapkan mendapat legitimasi dimasyarakat. Oleh karena itu program ini berlandaskan nilai-nilai sosial yang dapat menarik perhatian masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang berada di garis kemiskinan. Dikutip dari prabowogibran2.id, rencananya program ini akan menysasar 82,9 juta warga Indonesia yang terdiri dari anak usia dini (pra SD) sebanyak 30 juta anak, anak SD sebanyak 24 juta murid, SMP sebanyak 9,8 juta murid, SMA dan SMK sebanyak 10,2 juta murid, santri sebanyak 4,3 juta santri, dan ibu hamil sebanyak 4,4 juta jiwa. Target dari program makan siang gratis adalah menghilangkan kelaparan akut dan kronis serta meningkatkan rata-rata pertumbuhan berat dan tinggi anak per tahun dibanding dengan rata-rata sebelum diadakannya program tersebut. Anthony Giddens (1984), melalui teori strukturasi, memberikan pandangan yang komprehensif mengenai bagaimana struktur legitimasi berfungsi dalam masyarakat. Struktur legitimasi, menurut Giddens, berkaitan dengan aturan normatif yang mengarahkan perilaku dan menetapkan apa yang dianggap sebagai perilaku yang sesuai dalam tatanan sosial tertentu. Dalam konteks kebijakan makan siang gratis seperti yang telah dijelaskan di atas, ada beberapa aspek penting yang dapat dikaitkan dengan pandangan Giddens tentang struktur legitimasi:

1. Pembentukan Aturan dan Norma: Kebijakan makan siang gratis berusaha untuk menetapkan aturan baru dalam konteks pendidikan dan kesejahteraan sosial. Dengan mengintegrasikan program makan siang ke dalam sistem pendidikan, pemerintah berupaya membentuk norma baru bahwa setiap siswa berhak mendapatkan akses ke makanan bergizi selama jam sekolah. Ini sesuai dengan pandangan Giddens bahwa struktur legitimasi melibatkan pembentukan aturan yang mengikat individu dalam tatanan sosial tertentu.
2. Legitimasi Melalui Nilai Sosial: Pemerintah membangun legitimasi kebijakan ini dengan menekankan nilai-nilai kesejahteraan dan pendidikan. Menurut Giddens, legitimasi diperoleh ketika kebijakan atau tindakan sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang diterima dalam masyarakat. Dalam hal ini, kebijakan makan siang gratis diposisikan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak dan mendukung pendidikan mereka, yang merupakan nilai-nilai penting dalam masyarakat.

Legitimasi kebijakan ini berkaitan erat dengan pembentukan aturan normatif yang menentukan apa yang dianggap sebagai perilaku yang sesuai, mengikat individu dalam

tatanan sosial tertentu. Dalam konteks program makan siang gratis, pemerintah berusaha untuk membangun legitimasi dengan menetapkan program ini sebagai kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai kesejahteraan sosial dan pendidikan.

Dalam konteks sosial lainnya, penolakan dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) juga menjadi pengaruh pada diproduksinya wacana ini di media. penolakan ini didasarkan pada realitas penggunaan dana BOS di sekolah yang mayoritas dananya digunakan untuk menggaji guru atau tenaga pendidik honorer. Berdasarkan hal tersebut, muncul kekhawatiran apabila program makan siang gratis dilaksanakan melalui pendanaan dana BOS dapat mempengaruhi sistem penggajian bagi tenaga pendidik honorer yang selama ini dilakukan melalui dana BOS. Reaksi dari P2G merupakan resistensi agen terhadap perubahan struktur yang dianggap akan merugikan mereka. Munculnya sikap resistensi terhadap wacana menunjukkan bahwa perubahan dalam struktur sosial selalu dihadapkan pada negosiasi dan kompromi antara berbagai agen yang terlibat. Ini kembali menegaskan pandangan Giddens (1984) yang mengatakan bahwa struktur dan agen saling terkait secara dinamis dan terus menerus dalam proses produksi dan reproduksi struktur sosial.

SIMPULAN

Dari penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa analisis wacana kritis efektif dalam mengungkap bagaimana wacana, baik lisan maupun tulisan yang muncul di media massa dapat menggambarkan interaksi sosial-politik dalam masyarakat. dalam dimensi analisis teks, isi teks pada pemberitaan tersebut menyeimbangkan antara potensi manfaat dari program makan siang gratis dengan kekhawatiran praktis tentang sumber dana dan dampaknya pada gaji guru. Hal ini menciptakan framing yang kompleks di mana pembaca dapat melihat kedua sisi dari isu tersebut. Dalam dimensi produksi, artikel tersebut diproduksi dengan tujuan untuk menginformasikan dan mempengaruhi opini publik mengenai usulan tersebut. Dalam dimensi analisis sosial, wacana yang berkembang di media digunakan untuk membentuk opini publik, dan merubah struktur yang ada (kebijakan dana BOS) untuk digunakan dalam merealisasikan program makan siang gratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Austin, J. L. (1975). *How to Do Things with Words?*. Oxford: Oxford University Press.
- Fairclough, Norman. (1995). *Media Discourse*. London: Edward Arnold.
- Giddens, A. (1984). *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration Edisi Bahasa Indonesia*. (Maufur, & Daryanto penerjemah) Yogyakarta: Pustaka Belajar.

- Hamad, I. (2007). Lebih dekat dengan analisis wacana. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 8 (2), 325-344.
- Haryatmoko. (2022). *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis): Landasan Teori, Metodologi, dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hayat, N., Hardiansyah, M. A., Rojak, A., Destiana, A. W., Yulianti, A., Zahra, M., & Mulyani, S. T. (2023). Kekuasaan Dalam Organisasi Politik (Studi Kasus: Kelurahan Jambu Karya). *Jurnal Kajian Pembelajaran dan Keilmuan*, 7(1), 22-28.
- Tempo.co. *Dana BOS Untuk Program Makan Siang Gratis*. diakses dari <https://grafis.tempo.co/read/3540/dana-bos-untuk-program-makan-siang-gratis> pada 21 April 2024.